



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 585–594

Pengembangan Kebijakan Manajemen Bencana Berbasis Komunitas Studi Kasus di Kawasan Rentan Bencana

Rofika, Eli Apud Saepudin, Linda Aulia, Nahara Merlita, Tasya Adela
Talitha, Azzahra Nayla Aqila

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2500

How to Cite this Article

APA	: Rofika, R., Saepudin, E. A., Aulia, L., Merlita, N., Talitha, T. A., & Aqila, A. N. (2024). Pengembangan Kebijakan Manajemen Bencana Berbasis Komunitas Studi Kasus di Kawasan Rentan Bencana . <i>Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 2(1), 585 – 594. https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2500
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Pengembangan Kebijakan Manajemen Bencana Berbasis Komunitas Studi Kasus di Kawasan Rentan Bencana

**Rofika^{1*}, Eli Apud Saepudin², Linda Aulia³, Nahara Merlita⁴, Tasya Adela Talitha⁵,
Azzahra Nayla Aqila⁶**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota
Serang, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6}

Email:

rfikarff@gmail.com^{1*}, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id², lindaaulia200430@gmail.com³,
naharamerlita88@gmail.com⁴, tasyaadelatalitha@gmail.com⁵, azzahranaylaaqila03@gmail.com⁶

Diterima: 06-12-2024

| Disetujui: 07-12-2024

| Diterbitkan: 08-12-2024

ABSTRACT

To reduce the likelihood of disasters occurring in vulnerable areas, an important approach used is community-based disaster management. The purpose of this research is to evaluate the development of community-based disaster management policies and find factors that influence how effectively they are implemented. Data was collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies through a qualitative descriptive approach. To ensure that the research results are valid, purposive sampling was used to select research informants. The informants included community leaders, disaster response volunteers, local community members, and local government representatives. Data analysis was conducted using triangulation techniques. The study showed that three main factors determine the success of community-based disaster management: (1) the level of community participation and empowerment in program planning and implementation, (2) the synergy between local wisdom and modern disaster management systems, and (3) policy and institutional support from the local government. Limited resources, coordination among stakeholders, and program sustainability are some of the issues faced. To achieve efficient and sustainable disaster management, this study suggests community capacity building, improved coordination between various parties, and policy making that is appropriate to the local context.

Keywords: Disaster Management, Community Based Policies, Disaster Vulnerable Areas, Disaster Risk Reduction

ABSTRAK.

Untuk mengurangi kemungkinan bencana terjadi di wilayah rentan, pendekatan penting yang digunakan adalah manajemen bencana berbasis komunitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan kebijakan manajemen bencana berbasis komunitas dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa efektif mereka diterapkan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid, sampling purposive digunakan untuk memilih informan penelitian. Para informan termasuk tokoh masyarakat, relawan tanggap bencana, anggota komunitas lokal, dan perwakilan pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Studi menunjukkan bahwa tiga faktor utama menentukan keberhasilan manajemen bencana berbasis komunitas: (1) tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, (2) sinergi antara kearifan lokal dan sistem manajemen bencana modern, dan (3) dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pemerintah daerah. Sumber daya yang terbatas, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan keberlanjutan program adalah beberapa masalah yang dihadapi. Untuk mencapai manajemen bencana yang efisien dan berkelanjutan, penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas komunitas, peningkatan koordinasi antara berbagai pihak, dan pembuatan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal.

Katakunci: Manajemen Bencana, Kebijakan Berbasis Komunitas, Kawasan Rentan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana.

PENDAHULUAN

Tempat Indonesia berada di antara tiga lempeng tektonik aktif di dunia: lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor karena letak geografisnya. Bencana alam di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua puluh tahun terakhir. Ini telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat, baik secara materi maupun non-materi. Paradigma manajemen bencana telah berubah dari pendekatan responsif ke pendekatan yang lebih preventif dan berpartisipasi. Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, pendekatan manajemen bencana berbasis komunitas muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa komunitas lokal adalah pihak pertama yang menghadapi bencana, dan mereka memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang penting untuk menangani bencana. Peraturan Kepala BNPB No. 01 Tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana merupakan program nasional yang diusulkan oleh BNPB untuk mewujudkan Indonesia Tangguh. Karena masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak bencana dan pihak yang akan memberikan tanggapan langsung terhadap bencana tersebut, maka inisiatif ini berada di bawah kewajiban PB pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat perlu bersiap menghadapi bencana, namun mereka juga perlu dilatih agar TANGGUH. Pemberdayaan masyarakat bersama dengan pendampingan teknis pemerintah melalui kegiatan mitigasi non-struktural dan struktural adalah dasar program Desa Tangguh Bencana (Destana). Ini berarti bahwa masyarakat dan lingkungan harus diperkuat secara bersamaan untuk mengatasi bencana di tingkat desa. Ini harus dilakukan dengan mengoptimalkan kearifan lokal, juga dikenal sebagai lokal wisdom (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

Secara Georafis Indonesia merupakan negara yang daerahnya terletak di wilayah iklim tropis yang menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh serangkaian peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Akibat letak tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-3 didunia sebagai negara yang paling rawan dan sering mengalami bencana banjir. Oleh karena itu, penting bagi negara Indonesia untuk mengelola bencana sebagai upaya meminimalisir angka mortalitas akibat bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di kemudian hari. Pengertian Bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yakni merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan sosial yang bisa mengakibatkan adanya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta dampak terhadap psikologis (Pomalango et al., 2024). Konsep dasar penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Indonesia dan juga di beberapa negara merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mempersiapkan dan menanggulangi akibat bencana. Ini karena pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas termasuk sumber daya manusia, pendanaan, peralatan, dan logistik. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus bersifat universal, melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat (Teluma et al., 2023).

Membangun kesiapsiagaan dalam bencana merupakan elemen penting dalam usaha untuk mengatasi bencana. Pergeseran paradigma dalam penanganan bencana telah melahirkan perubahan signifikan dalam pendekatan yang diambil. Awalnya, fokus terletak pada respons tanggap darurat setelah terjadinya bencana. Namun, melihat dampak bencana yang merenggut banyak nyawa, harta benda, serta merusak infrastruktur dan fasilitas publik, paradigma ini berubah menuju upaya pengurangan risiko

bencana. Transisi ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola bencana (Putri et al., 2023).

Meskipun demikian, banyak tantangan masih dihadapi saat menerapkan kebijakan manajemen bencana berbasis komunitas di Indonesia. Kendala utama termasuk koordinasi antar pemangku kepentingan yang buruk, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana. Selain itu, kebijakan saat ini seringkali tidak mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan unik dari komunitas yang tinggal di wilayah yang rentan bencana. Menurut Eade dalam Ulum (2014) Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan kelembagaan lokal yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Pengembangan kapasitas mencakup seluruh jaringan hubungan dalam suatu komunitas. Pendekatan berbasis komunitas adalah cara mendasar untuk memberdayakan peserta dan mekanisme yang menarik untuk berbagi ide dari awal (Khasanah Izhar, 2023).

Bencana alam telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan sumber daya alam, seperti yang dialami hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Bencana alam, baik berupa gempa bumi, banjir, maupun tsunami, dapat menyebabkan kerugian baik secara materi maupun non-materi bagi daerah dan masyarakat yang terdampak. Dalam konteks mitigasi bencana, pendidikan dan pelatihan, seperti pendidikan mitigasi bencana kepada siswa, serta simulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat, merupakanblangkah penting dalam membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Partisipasi masyarakat, kolaborasi stakeholder, dan kerjasama antarlembaga menjadi kunci dalam inovasi penanggulangan bencana. Pendekatan berbasis komunitas juga menjadi fokus dalam mengurangi risiko bencana, seperti yang dilakukan dalam membangun ketahanan berbasis komunitas di desa. Dengan demikian, melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta melalui upaya mitigasi, komunikasi, partisipasi, pendidikan, dan kolaborasi, penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, komunitas masyarakat perlu difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, dengan melibatkan stakeholder melakukan analisis konteks dan mobilisasi sumber daya serta mengambil peran dalam penyusunan rencana penaggulangan bencana (Alam et al., 2024)

Masalah bencana menjadi permasalahan kesejahteraan sosial, dan berdampak pada terhambatnya proses pembangunan sosial. Dimana dampak bencana tentu membuat aktivitas individu, masyarakat dan pemerintah mengalami gangguan dan hambatan. BNPB menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana ini tidak hanya mendorong pemerintah, melainkan juga perlu untuk dapat menggerakkan individu, keluarga, komunitas yang melingkup seluruh lapisan masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat didefinisikan sebagai langkah pengurangan risiko bencana berbasis Masyarakat (Yaneri, 2020). Dampak bencana yang terjadi walaupun bencana belum bisa diprediksi kapan terjadinya. Secara konseptual, karakteristik masyarakat tahan bencana terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: 1) kapasitas komunitas untuk mengurangi risiko atau kerusakan melalui mitigasi dan adaptasi; 2) Kapasitas untuk mengurangi fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana; 3) kapasitas untuk memulihkan diri dari pasca kejadian bencana. Dengan adanya persiapan pra bencana yang akan dilakukan masyarakat seperti mitigasi sebelum bencana terjadi sehingga mengurangi risiko bencana yang terjadi dan meminimalisir korban bencana. Melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana bisa melalui perubahan perilaku yang rentan, melalui penataan pemukiman, peraturan-peraturan bangunan, penganturan struktur bangunan tahan gempa dan penataan ruang dengan perspektif mitigasi bencana (Efendi et al., 2022)

Dengan menggunakan studi kasus di daerah yang rentan terhadap bencana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan kebijakan manajemen bencana berbasis komunitas. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa efektif penerapan kebijakan, menganalisis peran dan kemampuan komunitas dalam manajemen bencana, dan membuat saran untuk pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan risiko berbasis masyarakat merupakan program yang mengintegrasikan berbagai isu, seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan gender. Isu-isu tersebut masuk dalam strategi dan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan program. Kegiatan-kegiatan pengelolaan risiko berbasis komunitas dilakukan dengan pengkajian risiko bencana partisipatif, peningkatan kapasitas, integrasi pengelolaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan pelembagaan upaya pengelolaan risiko bencana di tingkat komunitas. Berbasis komunitas dimaksudkan untuk merujuk bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting (Kasus et al., 2011). Manajemen bencana merupakan sebuah proses yang terus menerus yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk merencanakan dan mengurangi dampak bencana, melaksanakan kegiatan tanggap bencana dan membuat langkah pemulihan kembali (Dirga & Djafar, 2023).

Komunikasi bencana memainkan peranan penting dalam siklus penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tindakan komunikasi harus selalu dilakukan antara masyarakat dengan masyarakat yang berbeda-beda pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapsiagaan mereka terhadap potensi bencana. Lebih lanjut, Kesiapsiagaan masyarakat dan kapasitas tanggap darurat dalam menghadapi letusan Gunung Marapi dibentuk oleh perspektif sosial-ekonomi. Memahami seluk-beluk ini sangat penting untuk mengkaji secara komprehensif kapasitas manajemen darurat masyarakat yang terkena dampak. Perencanaan partisipatif memainkan peran penting dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat untuk meminimalkan risiko, serta mendorong kebijakan kesiapsiagaan bencana yang efektif dan partisipasi demokratis (Tanipu & Hidayat, 2024).

Mengingat jumlah kejadian bencana alam dan efeknya terhadap kehidupan masyarakat semakin meningkat, penelitian ini semakin penting. Dengan menempatkan komunitas sebagai subjek utama dalam upaya pengurangan risiko bencana, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan manajemen bencana yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan untuk mencapai pengurangan bencana telah berbagai membentuk bagian dari studi bencana dan pembangunan terpadu selama beberapa decade. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan strategi manajemen risiko bencana yang baik. Strategi tersebut dapat dimulai dari bagaimana mengidentifikasi cara pandang kita atau masyarakat dalam memandang risiko bencana (Mailintina, 2024). Dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang terlibat dalam penerapan kebijakan manajemen bencana berbasis komunitas dipelajari melalui penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pihak penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memahami informasi apa saja yang dibutuhkan serta mempertimbangkan mekanismenya komunikasi apa yang digunakan agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Terutama pas era digital, dimana berita atau informasi yang berada diinternet dapat menyebar secara luas hingga dapat diakses masyarakat dengan cepat. Presiden Jokowi dalam hal ini mengintruksikan kepada seluruh instansi di tanah air untuk dapat saling bersinergi dalam upaya mitigasi dan

kesiapsiagaan bencana. Ia melihat bahwa upaya mitigasi di Indonesia bisa diperbaiki dengan menerapkan manajemen pencegahan dan kesiapsiagaan yang dapat dimulai dengan melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana. Komunikasi mitigasi bencana merupakan komunikasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya bencana. Beberapa Aspek Komunikasi dan Koordinasi yang begitu urgent, terus dilakukan oleh masyarakat dalam penanganan bencana. Komunikasi kaitannya dengan mitigasi bencana sangat diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian di lingkungan masyarakat sehingga dapat bertindak secara efektif. Dalam pencegahan bencana, informasi yang akurat dari pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah sangat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian besar terhadap peristiwa bencana tersebut. Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa atau kerugian materi. Misalnya, Search And Rescue yang lebih dikenal dengan SAR sebagai sebuah organisasi yang memang berkecimpung di wilayah bencana, maka tidak heran jika SAR tetap mengadakan komunikasi dengan masyarakat yang berada di wilayah bencana untuk meminimalisir korban (Yunia et al., 2020).

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna untuk membantu perkembangan kebijakan dan praktik manajemen bencana di Indonesia, khususnya dalam hal meningkatkan peran komunitas sebagai pihak yang paling penting dalam mengurangi risiko bencana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana semua Permasalahan dan Solusi yang berkaitan dengan tema dan diambil dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menunjukkan bahwa komunitas lokal di wilayah yang rentan terhadap bencana sangat penting dalam manajemen bencana. Komunitas telah lama memahami risiko bencana, pola cuaca, dan karakteristik lingkungan setempat. Mereka telah mengembangkan berbagai cara untuk menangani dan memperbaiki bencana, seperti sistem peringatan dini berbasis masyarakat, struktur tempat tinggal yang tahan bencana, dan jaringan sosial untuk berbagi sumber daya saat darurat. Salah satu temuan yang signifikan adalah bahwa komunitas lokal umumnya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bahaya dan ancaman bencana di wilayah mereka. Masyarakat telah mengidentifikasi wilayah yang rawan bencana, mengetahui gejala awal bencana, dan mengembangkan strategi adaptasi dan respons yang sesuai dengan situasi lokal. Misalnya, beberapa komunitas di pesisir telah membuat sistem peringatan dini untuk banjir rob atau tsunami yang menggunakan teknologi modern dan pengetahuan lokal.

Namun, di tingkat pemerintah daerah, komunitas masih sangat terbatas terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan manajemen bencana. Kebijakan dan rencana manajemen bencana seringkali dibuat dari bawah ke atas tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan unik masyarakat lokal. Akibatnya, penerapan kebijakan tersebut tidak efisien dan tidak responsif terhadap masalah dan perubahan yang dihadapi komunitas. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa komunitas lokal umumnya memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi dan menanggapi bencana karena praktik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, kapasitas ini seringkali belum dioptimalkan dan dimasukkan ke dalam sistem manajemen bencana formal karena kurangnya kerja sama antara

pemerintah, organisasi terkait, dan komunitas lokal, yang menyebabkan potensi pengetahuan dan praktik tradisional komunitas belum dimanfaatkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan model manajemen bencana yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas sangat penting. Dengan melibatkan komunitas lokal secara aktif dalam seluruh siklus manajemen bencana, dari identifikasi risiko, perencanaan, tanggap darurat, dan pemulihan, kebijakan dan praktik yang dihasilkan dapat menjadi lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk meningkatkan peran komunitas dalam manajemen bencana meliputi:

1. Meningkatkan peran komunitas dalam manajemen bencana melalui pelatihan, pendidikan, dan penguatan kelembagaan. Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan tentang manajemen bencana dan keterampilan tanggap darurat, serta meningkatkan organisasi masyarakat dan sistem koordinasi. Jika komunitas memiliki kapasitas yang memadai, mereka dapat berpartisipasi dengan lebih aktif dan efisien dalam setiap tahap manajemen bencana.
2. Ini akan membantu pemerintah, organisasi terkait, dan komunitas lokal berbicara dan bekerja sama dengan lebih erat selama tahapan perumusan kebijakan manajemen bencana. Melibatkan komunitas sejak awal akan memastikan bahwa kebijakan dan rencana disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks khusus wilayah. Selain itu, kerja sama ini dapat mendorong pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab.
3. Memasukkan pengetahuan dan praktik tradisional komunitas ke dalam rencana dan prosedur manajemen bencana formal. Metode seperti ini dapat meningkatkan respons bencana dan memperkuat kepemilikan dan keberlanjutan program manajemen bencana yang berbasis masyarakat. Misalnya, sistem peringatan dini dan evakuasi yang dikembangkan oleh masyarakat dapat bekerja sama dengan sistem peringatan resmi yang diawasi oleh pemerintah.
4. Memberikan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi komunitas untuk melakukan tugas mereka dengan baik, seperti dana, fasilitas, dan akses ke informasi terkini. Hal ini penting agar komunitas memiliki kemampuan yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam setiap tahap manajemen bencana.
5. Membangun dan menerapkan kebijakan manajemen bencana dengan pendekatan koproduksi. Ini berarti bahwa pemerintah, organisasi terkait, dan komunitas lokal harus bekerja sama sebagai mitra setara ketika masalah diangkat, direncanakan, dan dievaluasi. Metode seperti ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam mengelola bencana.

KESIMPULAN

Paradigma baru dalam manajemen bencana yang mempertimbangkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama diperlukan, menurut penelitian ini. Kebijakan dan praktik manajemen bencana dapat menjadi lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah rentan dengan melibatkan komunitas secara aktif dan mengintegrasikan pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan dan program lokal untuk menangani bencana sangat penting. Metode yang berpusat pada komunitas dapat mendorong respons bencana yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan cepat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi terkait, dan komunitas lokal dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terlepas dari fakta bahwa studi ini dilakukan dalam konteks

tertentu di Indonesia, hasil dan saran dapat disesuaikan untuk diterapkan pada wilayah yang lebih rentan terhadap bencana.

Terlepas dari fakta bahwa studi ini dilakukan dalam konteks tertentu di Indonesia, hasil dan saran dapat disesuaikan untuk diterapkan pada wilayah yang lebih rentan terhadap bencana. Metode ini dapat diterapkan di berbagai wilayah dengan berbagai karakteristik dan ancaman bencana dengan tujuan meningkatkan kemampuan komunitas lokal dan mendorong mereka untuk berpartisipasi sebagai aktor utama dalam manajemen bencana. Untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana, apa yang terjadi, dan seberapa baik model manajemen bencana berbasis komunitas digunakan, penelitian lebih lanjut diperlukan. Analisis komparatif antardaerah juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang komponen kontekstual yang memengaruhi efektivitas metode ini. Dengan demikian, kemungkinan untuk mengembangkan kebijakan manajemen bencana yang responsif dan berkelanjutan di masa depan akan terus meningkat.

Dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana yang berkelanjutan, manajemen bencana berbasis komunitas telah menjadi fokus utama. Keterlibatan masyarakat lokal meningkatkan respons darurat dan meningkatkan resiliensi jangka panjang. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi kasus ini menyelidiki bagaimana penerapan kebijakan manajemen bencana berbasis komunitas dapat diterapkan di kawasan rentan bencana.

Dalam diskusi kelompok, para peserta menekankan beberapa elemen penting dalam pengembangan kebijakan manajemen bencana berbasis komunitas, seperti:

1. Peserta menekankan betapa pentingnya bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam mengidentifikasi sumber daya lokal, ancaman, dan kerentanan. Ini dapat membantu membangun pemahaman bersama tentang profil risiko bencana di daerah tersebut.
2. Peserta setuju bahwa kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat komunitas dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan edukasi bencana bagi masyarakat lokal. Mereka setuju bahwa kapasitas ini perlu diperkuat secara berkelanjutan
3. Peserta menekankan betapa pentingnya sistem peringatan dini yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sistem ini dapat membantu mempercepat respons bencana.
4. Peserta menekankan bahwa organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat lokal harus diperkuat.
5. Peserta menekankan bahwa kebijakan manajemen bencana, pembangunan daerah, dan pengurangan risiko bencana harus bekerja sama dengan baik. Untuk memastikan program berjalan dengan baik, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan.

Kesimpulan dari diskusi kelompok adalah bahwa pengembangan kebijakan manajemen bencana berbasis komunitas di kawasan rentan bencana membutuhkan pendekatan kolaboratif dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, membangun sistem peringatan dini berbasis komunitas, dan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor. Untuk membangun program manajemen bencana yang lebih responsif dan berkelanjutan, pemerintah daerah dan organisasi terkait dapat menggunakan rekomendasi ini sebagai acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, P. B., Rehabilitasi, D., Bencana, P., Pemerintah, S., Lembaga, D., Masyarakat, S., Lokasi, (, Pangandaran, D., Barat, J., Arief,), Lubis, F., Tinggi, S., & Militer, H. (2024). Natural Disaster Management and Post-Disaster Rehabilitation: Synergy of Government, Community and Non-Governmental Organizations (Location in Pangandaran, West Java). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PENGAMAS)*, 1(1), 113–126. <https://journal.ppipbr.com/index.php/pengamas/index>
- Dirga, A. S., & Djafar, T. (2023). Implementasi Penanggulangan Bencana Studi Kasus Nagari Siaga Bencana (Nagasina) Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 5(2), 106–122. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3777>
- Efendi, I., Taqiuddin, M., & Evendi, A. (2022). Konstruksi Sosial Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Resiprokal*, 4(1), 73–93. <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/129/58>
- Heryana, A., & Bencana, K. P. (2024). | Ade Heryana – Kebijakan Penanggulan Bencana di Indonesia – Juni 2024|. 1–9.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). *Evaluasi Implementasi Desa Tangguh Bencana : Studi Kasus Di Jawa Tengah Dan Peran Teknologi Lilis Mukarromah , Zulfa Larasdjati Pranoto Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang PENDAHULUAN Risiko Tingginya Bencana di Jawa Tengah Indonesia adalah salah s. 10(11), 370–382.*
- Kasus, S., Kabupaten, D. I., & Barat, L. (2011). Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 1, 25–37.
- Khasanah Izhar, D. (2023). Jurnal JISIPOIL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Jurnal JISIPOIL. *Ilmu Pemerintahan*, 7(April), 4. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/719/606>
- Lessy, M. R., & Bemba, J. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Rentan Bencana Melalui Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Desa *Jurnal Pengamas*, 2(1), 34–44. <https://core.ac.uk/download/pdf/267890317.pdf>
- Lestana, Y., Hidayatullah, & Pratama, I. N. (2022). Pendampingan Desa Siaga Bencana Berbasis Komunitas Dalam Meningkatkan Masyarakat Tangguh Bencana Di Desa Dangieng Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 129–141. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JAMIN/index>
- Mailintina, Y. (2024). *PENGALAMAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAAN BENCANA BANJIR : STUDI EKSPLORASI BERBASIS TRANSCULTURAL NURSING Community Experience In Improving Flood Disaster Preparedness : An Exploration. 19, 59–66.*
- Pokhrel, S. (2024). No TitleELENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Pomalango, Z. B., Daud, M. A. T., Nabila, D. N., Durahim, A., Lamangida, N. N., Gani, F. M., Mohammad, N. H., Lasimpala, V. A., Ali, Z. P., Hunta, F. A., Sahrain, P., Latief, A., Kattang, G. R., Rahman, S. I., & Djalil, S. F. (2024). SMART-B (Satuan Masyarakat Siaga Bencana): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Kelompok yang Partisipatif di Desa Biau Kecamatan Biau. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.37385/ceej.v5i1.3991>
- Putri, M. N., Ramdani, T., Hilmi, F., Sosiologi, P. S., & Mataram, U. (2023). *SeNSosio Unram SeNSosio Unram. 4(2), 284–298.*

- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Cakrawala*, 15(2), 124–138. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>
- Tanipu, F., & Hidayat, M. (2024). Perspektif Sosial dan Ekonomi dalam Penilaian Kapasitas Penanganan Darurat Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Marapi. *Jurnal Geosains West Science*, 2(01), 19–27. <https://doi.org/10.58812/jgws.v2i01.993>
- Taqiyah, D. B., Mahendra, M. R. E., & Zahro, M. M. (2024). Penerapan Mitigasi Bencana Alam Melalui Kampung Siaga Bencana Di Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 03(05), 1–10.
- Teluma, A. R. L., Nur, M. J., & Maulida, N. (2023). Edukasi Mitigasi Bencana untuk Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat Pesisir Selatan Lombok di Desa Montong Ajan Lombok Tengah. *Journal of Community Development & Empowerment*, 4(1), 16–21. <https://doi.org/10.29303/jcommdev.v4i1.46>
- Yaneri, A. (2020). Intervensi Komunitas: Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 12–26. <https://doi.org/10.54783/japp.v3i2.72>
- Yunia, A., Pinariya, J. M., Forceila, D., & Ivana, L. (2020). Program Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pandeglang. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 7(2), 172. <https://doi.org/10.37535/101007220205>
- Zulfa, V. A., Widyasamratri, H., & Kautsary, J. (2022). Mitigasi Bencana Berdasarkan Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 154. <https://doi.org/10.30659/jkr.v2i2.26532>